

DAMPAK KEBIJAKAN PENINGKATAN TECHNO-ECONOMY PADA INDUSTRI TEKSTIL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING BANGSA^{*)}

P. Eko Prasetyo

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
Kampus FE UNNES Sekaran Semarang (024 8508015)
email: prasetyo.dr.eko@gmail.com

ABSTRAK

Kunci utama kemandirian bangsa adalah daya saing nasional yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif. Peningkatan kapasitas IPTEK dan produktivitas adalah kunci sukses meraih daya saing industri dan bangsa secara berkelanjutan. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas SDM melalui pengembangan IPTEK dan produktivitas berkelanjutan yang kuat harus didukung oleh pembangunan nasional semesta berencana di bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan secara seimbang merupakan syarat mutlak dalam upaya meningkatkan daya saing global secara berkelanjutan. Paradigma baru “*Techno-economy*” atau *Technopreneur* di era globalisasi lebih mampu memberikan kontribusi signifikan melalui peningkatan kapasitas, produktivitas dan inovasi dalam peningkatan daya saing bangsa berkelanjutan. Artinya, untuk mewujudkan daya saing nasional berkelanjutan, di era global harus diukur dari seberapa besar kemampuan IPTEK sebagai faktor utama ekonomi dalam menggantikan peran modal, lahan, energi untuk peningkatan daya saing bangsa. Hasil riset menegaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam peningkatan kapasitas SDM melalui penguasaan IPTEK pada industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) lebih mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing kompetitif melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, kreatifitas dan inovasi yang dibangun melalui integrasi “*Techno-economy*” yang berwawasan lingkungan global berkelanjutan. Artinya, upaya peningkatan daya saing bangsa, harus direncanakan dan dibangun melalui tekno-ekonomi yang berwawasan lingkungan, karena era baru pembangunan nasional dan daya saing global harus berbasis pada pembangunan kapasitas manusia dan kelestarian lingkungan berkelanjutan.

Kata Kunci: Techno-economy” atau technopreneur, inovasi, produktivitas dan daya saing

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, sudah saatnya Indonesia memiliki paradigma baru tekno ekonomi (*Techno-economy paradigm*) untuk meningkatkan daya saing berkelanjutan. Paradigma ini menyakini bahwa teknologi sebagai kontibutor utama dalam peningkatan kualitas hidup bangsa. Paradigma ini membawa implikasi terjadinya pergeseran perekonomian dunia yang semula berbasis pada sumberdaya ekonomi (*Resource based economy*) menuju perekonomian yang lebih berbasis kepada ilmu pengetahuan (*Knowledge based economy*) dan teknologi (IPTEK) sebagai kunci utamanya.

Pada prinsipnya, pengembangan perekonomian berbasis *knowlegde-based economy* (KBE) lebih mengandalkan manusia dengan tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu sebagai kapital atau sumber ekonomi kemakmuran negara. *Knowlegde-based economy country* dipahami sebagai konsep ekonomi yang dikembangkan suatu negara dengan berbasiskan pengetahuan dan diimplementasikan dalam industri berteknologi serta tenaga kerja kompeten, berproduktivitas tinggi, kreatif dan inovatif. Menurut Bank Dunia, ada empat hal utama yang harus dilakukan Negara untuk menompang penetrasi *knowledge-based economy* tersebut yakni;

- 1) Kebijakan dan regulasi ekonomi dan industri untuk memicu pertumbuhan pengetahuan / teknologi baru serta *entrepreneurship* nasional,
- 2) Lembaga pendidikan dan pelatihan berkualitas,
- 3) Sistem inovasi industri/perusahaan berbasis riset yang unggul, dan
- 4) Teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk memfasilitasi pemrosesan serta penyebaran informasi/pengetahuan/komunikasi efektif.

Pokok masalah umum yang akan dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana dampak kebijakan pemerintah dalam upayanya meningkatkan daya saing bangsa. Sedangkan pokok masalah khususnya adalah bagaimana dampak kebijakan peningkatan *Techno-Economy* yang terjadi pada industri TPT sebagai upaya untuk peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, melalui penguasaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) lebih mampu meningkatkan produktivitas, dan daya saing industri serta daya saing bangsa secara berkelanjutan. Pokok pertanyaan analisis lainnya adalah mengapa perlu meningkatkan *Techno-Economy*, dan apa hubungannya peningkatan *Techno-Economy* dengan daya saing berkelanjutan dan mengapa daya saing harus berkelanjutan?

PEMBAHASAN

Techno-Economy dan Technopreneur

Jika “tidak ada cara yang terbaik, maka akan tetap selalu ada cara yang lebih baik”, inilah konsep dasar produktivitas yang dimaksud sebagai upaya peningkatan daya saing. Di mana produktivitas dan inovasi menjadi kata kunci dalam mengatasi keterbatasan sumberdaya. Secara spesifik konsep produktivitas dan inovasi adalah konsep dasar utama dalam meraih daya saing pembangunan keberlanjutan. Pada saat ini, inovasi telah menjadi isu sentral dalam pengelolaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena perannya sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Para pelaku industri dan pengambil kebijakan di berbagai negara maju telah menjadikan inovasi sebagai kunci perbaikan yang radikal untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup dan sukses berbisnis di era global.

Kebijakan pemerintah Jokowi-JK pada saat ini juga telah bertekad untuk melakukan gerakan inovasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan tersebut dilakukan karena Indek KBE yang dimiliki Indonesia masih jauh berada di bawah negar-negara tetangga Asia seperti; Jepang, Singapura, Korea, China, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Indek tersebut dipeoleh berdasarkan dua aspek utama, yaitu; *Economic and Institutional Regime Index* dan *Knowledge Index* (KI). Penjabaran dari dua faktor ini antara lain: *tariff and non-tariff barriers, regulatory quality, rule of law, education index, innovation index, dan ICT index*. Indek KBE atau KI merupakan salah satu parameter dalam pengaplikasian konsep Kinerja Ekonomi Berkelanjutan.

Kebijakan Pemerintah Jokowi-JK di dalam penentuan target kinerja ekonomi berkeadilan dan berkedaulatan rakyat, di dasarkan pada tiga aspek yang dijadikan tolak ukur penilainnya yaitu;

- 1) Gross Domestic Product /Capita (GDP), mengukur nilai pasar total dari semua output yang ada, baik produk ataupun jasa, lalu dibagi dengan jumlah penduduk.
- 2) Indeks Sosial (GINI), mengukur tingkat perbedaan pendapat antara masyarakat berpenghasilan tinggi dengan masyarakat berpenghasilan rendah
- 3) *Environmental Performance Index* (EPI), mengukur tingkat pencemaran lingkungan

Ke tiga aspek inilah yang dijadikan sebagai landasan tolak ukur konsep pengertian *Techno-economy* (TE) dalam artikel ini. Pokok masalahnya adalah berdasarkan tiga aspek tolak ukur tersebut dapat dinyatakan Indonesia kondisinya lagi menurun. Dimana ketimpangan pendapatan ekonomi perkapita makin tinggi, serta indeks GINI juga makin meningkat yang menandakan ketipangan sosial makin melebar dan kerusakan lingkungan makin meningkat. Kaarena itu upaya peningkatan TE menjadi keharusan mutlak yang harus segera dilakukan bangsa Indonesia untuk meningkatkan daya saing bangsanya.

Pemerintah Jokowi-JK telah melakukan berbagai paket kebijakannya untuk mengatasi masalah tersebut. Sejak bulan September 2015 hingga Juni 2016, sudah ada 12 paket kebijakan diluncurkan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. Ada tiga fokus *paket kebijakan* ekonomi dalam jilid pertama salah satunya yang dikaji dalam artikel ini adalah kebijakan meningkatkan daya saing industri. Dua kebijakan lainnya dalam paket kebijakan pertama adalah masalah regulasi dan debirokratisasi untuk mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor property.

Menurut Matthias Aroef, (2009) dalam bukunya “Grand Techno-Economic Strategy”, ada tiga kata kunci kesuksesan kebijakan ekonomi nasional, yakni; kemampuan teknologi bangsa, produktivitas dan daya saing. Menuurutnya, untuk bisa memenangkannya diperlukan sebuah *grand-strategy* (*blue print*) dari pemerintah yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi saja, tetapi juga dari aspek teknologi dan ekonomi. Jadi berdasarkan konsep tersebut pula makna Techno-ekonomi yang dimaksud dalam artikel ini. Tetapi, menurut Matthias, *Grand Techno-Economic Strategy* bagi Indonesia masih juga mempunyai ancaman. Menurutnya, ancaman yang dimaksud adalah seperti pasar global yang berubah selepas insiden 911 di WTC AS, pengaruh *subprime mortgage*, dan “Cina Price” (Kebijakan Cina yang memanfaatkan krisis ekonomi pada waktu itu dengan memproduksi barang secara masal dan dijual murah).

Dalam artikel ini, ancaman yang dimaksud yang dapat membuat paket kebijakan Pemerintah Jokowi-JK bisa tidak berhasil dan bisa gagal justru adalah ancaman dari dalam negeri Indonesia sendiri yakni acaman birokrasi yang korup, mahal dan lambat. Ancaman dari dalam tersebut justru yang lebih mengerikan, namun dalam artikel ini tidak akan dikaji dan dibahas masalah ancaman tersebut. Karena yang akan dibahas lebih fokus ke masalah upaya kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia untuk meningkatkan daya saing industri dan bangsa. Sesuai dengan judul artikel ini di atas, maka pokok masalah pembahasan lebih difokuskan pada permasalahan dampak kebijakan peningkatan *techno-ekonomi* pada industri tekstil dan produk tekstil sebagai upaya peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa.

Dalam artikel ini yang dimaksud teknologi adalah berbagai cara atau upaya yang bisa digunakan untuk membuat hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam buku *Grand Techno-Economic Strategy*, yang dimaksud teknologi adalah terdiri dari beberapa jenis yakni; (1) *Humanware* (kemampuan manusia untuk membuat dna menggunakan mesin), (2) *Technoware* (kemampuan mesin secara teknis), (3) *Organware* (kemampuan organisasi),

dan (4) *Infoware* (kemampuan informasi). Selanjutnya nilai akhir keberhasilan sebagai tolak ukur *Economic Value Added* (EVA) harus sejalan atau berbanding lurus dengan *Technology Value Added* (TVA) yang digunakan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPM) 2015-2019 secara tegas telah menyatakan bahwa isu strategi pembangunan Iptek 2015-2019 adalah peningkatan kapasitas iptek berupa: (1) kemampuan memberikan sumbangan nyata bagi daya saing sektor produksi, (2) keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan (3) penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern, serta ketersediaan faktor-faktor yang diperlukan untuk mendukung masalah tersebut yakni; (SDM, sarana prasarana, kelembagaan iptek, jaringan, dan pembiayaan). Lebih lanjut disebutkan bahwa penyelenggaraan riset difokuskan pada bidang-bidang yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 yaitu: (1) pangan dan pertanian; (2) energi, energi baru dan terbarukan; (3) kesehatan dan obat; (4) transportasi; (5) telekomunikasi, informasi dan komunikasi (TIK); (6) teknologi pertahanan dan keamanan; dan (7) material maju.

Dengan demikian, semakin jelas bahwa paradigma tekno-ekonomi semakin dibutuhkan di Indonesia, karena dengan tekno-ekonomi yang dimaksud di atas lebih mampu mengoptimalkan dan meningkatkan nilai tambah penggunaan sumberdaya yang ada dan terbatas sifatnya. Kata kunci dari konsep dasar pemanfaatan teknologi, inovasi, produktivitas dan daya saing inilah yang dimaksud dalam paradigma tekno ekonomi dalam artikel ini. Pokok masalahnya adalah bagaimana kebijakan pemerintah termasuk industri dalam meningkatkan tekno ekonomi tersebut untuk meningkatkan daya saing industri dan bangsa secara berkelanjutan?

Lebih lanjut, tekno-ekonomi yang dimaksud dalam artikel ini juga dimaknai sama dengan kata kunci *Technopreneur*. Artinya, karena dalam artikel ini menggunakan konsep kata kunci teknologi sebagai salah satu variabel utama dalam meningkatkan daya saing, maka teknologi yang dimaksud itu dapat diartikan sebagai *Technopreneur*. *Technopreneur* yang dimaksud di sini adalah entrepreneur yang lebih mengoptimalkan berbagai potensi perkembangan teknologi yang ada sebagai basis pengembangan usaha industri yang dijalkannya. Dengan kata lain *Technopreneur* yang dimaksud dalam artikel ini adalah Entrepreneur modern yang lebih berbasis kepada teknologi dalam menjalankan usaha bisnis usaha dan industrinya, khususnya dalam industri TPT.

Dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi, diyakini daya saing industri TPT akan lebih mampu meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas dan daya saingnya. Karena melalui teknologi (IPTEK) sebagai faktor utama dalam industri TPT, maka akan lebih menentukan tingkat efektifitas, efisiensi serta proses transformasi pemanfaatan sumber daya baru yang lebih optimal dan bernilai tambah lebih tinggi. Karena itu, tekno ekonomi yang dimaksud dalam artikel ini bisa dimanai sebagai *Technopreneurship*. *Technopreneur* ini dibangun berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang berbasis pada pendidikan dan pelatihan yang didapatkannya di bangku sekolah, kuliah atau balaai latihan kerja dan sebagainya termasuk dari percobaan dan pengalaman kerja. Para *Technopreneur* ini cenderung lebih menggunakan teknologi seperti yang dimaksud di atas sebagai unsur paling utama dalam industri untuk pengembangan produksi dan kesuksesannya.

Artinya para *Technopreneur* ini bisa tumbuh dan berkembang bukan karena jejaringannya atau fasilitasnya seperti lobi-lobi politik dan sebagainya, namun lebih karena kreativitas dan inovasinya melalui teknologi yang digunakannya. Karena itu mereka yang bisa disebut *Technopreneur* adalah seorang Entrepreneur Modern yang berbasis teknologi, kreativitas dan inovasi yang paling utama dan mendominasi mereka dalam setiap usahanya untuk menghasilkan produknya yang lebih unggul dan memiliki daya saing yang tangguh secara berkelanjutan. Jadi kata kunci dari ekonomi berkelanjutan adalah pembangunan ekonomi bangsa yang lebih berbasis kepada IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang sering dikenal dengan implemtasi dari *Knowledge Based Economic* (KBE). Sedangkan, *techno-economy* merupakan dasar dari KBE yang dimaksud. Karena itu, jika kebijakan pemerintah mampu meningkatkan tekno-ekonomi, maka merupakan implemtasi dari KBE dan KBE sendiri adalah implemtasi dari daya saing idustri dan bangsa berkelanjutan.

Hasil riset menunjukkan bahwa pada industri TPT yang tenaga kerjanya memiliki ketrampilan dan tingkat pendidikan yang cenderung lebih tinggi, mereka ada kecenderungan lebih kreatif dan dapat mengerjakan multifungsi pekerjaan yang ditawarkan kepada mereka. Para pekerja golongan ini juga lebih cepat menerima perubahan termasuk pemanfaatan penggunaan teknologi baru dalam pekerjaannya. Namun demikian, sisi negatifnya bagi perusahaan industri TPT karena untuk kelompok pekerja ini lebih rentan terhadap isu demo dan rentan terhadap perpindahan kerja ke tempat lain jika mereka tidak dihargai ketrampilannya. Jika dilihat dari sisi pekerja, perilaku mereka sesungguhnya wajar dan rasional saja. Karena mereka juga memiliki hak memilih dan menghargai kemampuannya sendiri untuk ditukar dengan tingkat upah yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan dasar teori di atas, maka golongan para pekerja tersebut yang memiliki ketrampilan lebih baik adalah dapat dinyatakan ke dalam kemompok *technopreneursip*, karena mereka cenderung lebih kreatif dan lebih inovatif dibanding para pekerja biasa lainnya yang kebanyakan. Walaupun dalam hal tingkat efisiensi tidak ada perbedaan hasil yang berarti, namun dari segi kecepatan dan multifungsi dan multitalentanya mereka lebih dapat diandalkan dibanding kelompok para pekerja biasa. Hasil riset menunjukkan, dari segi tingkat efisiensi teknis secara umum industri TPT ini khsusnys di Jawa Tengah dapat dinyatakan telah mencapai tingkat efisiensi yang baik.

Namun dari segi efisiensi ekonomi dapat dinyatakan belum efisien. Sayangnya keterbatasan hasil riset ini belum bisa menjelaskan tingkat efisiensi ekonomis per kelompok para pekerja yang dimaksud.

Tabel-1: Nilai Efisiensi Teknis Industri Tekstil dan Produk Tekstil Provinsi Jawa Tengah

Sub Sektor	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rerata
Pemintalan	0,93	0,96	0,91	0,77	0,76	0,87	0,93	0,88	0,88
Tekstil	0,97	0,83	0,85	0,87	0,98	0,96	0,87	0,89	0,90
Perajutan	0,84	0,87	0,93	0,97	0,99	0,85	0,92	0,90	0,91
Pakaian Jadi	0,98	0,99	0,98	0,99	0,96	0,97	0,97	0,98	0,98
Rerata	0,93	0,91	0,91	0,90	0,92	0,92	0,91	0,92	

Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel-1: menunjukkan bahwa tingkat efisiensi teknis industri TPT adalah baik dan dapat dinyatakan efisien, karena nilai tersebut hampir sebagian menekati 1 yakni dengan nilai rerata di atas 0.90. Walaupun semua kelompok industri TPT adalah efisien secara teknis, namun jika di lihat data pada Tabel-1 tersebut juga nampak bahwa secara teknis pada kelompok industri pakaian jadi (garmen) nilai efisiensinya lebih baik dibanding tingkat efisiensi pada industri tekstil dan pemintalan.

Upah dan Produktivitas

Secara teori, semakin produktivitas suatu pekerja maka akan semakin tinggi tingkat upah yang diterimanya. Namun sebaliknya tidak menjamin jika upah semakin tinggi akan semakin tinggi tingkat upahnya. Berdasarkan tabel-2 di bawah ini, secara umum tampak semakin jelas bahwa tingkat rata-rata upah tenaga kerja pada industri TPT di Propinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta masih yang paling rendah jika dibandingkan dengan tingkat upah rata-rata pada industri TPT yang sama di wilayah daerah Propinsi Jawa Timur dan Bali serta di wilayah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. Hal ini semakin memperkuat argumentasi perlunya dilakukan riset lebih lanjut dalam industri TPT di Jawa Tengah agar siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA. 2015) yang memiliki daya saing semakin kompetitif. Jika tidak dilakukan hal yang lebih baik maka akan lebih rentan terhadap serangan dari para pekerja asing yang masuk ke Indonesia termasuk di Jawa Tengah dan DIY.

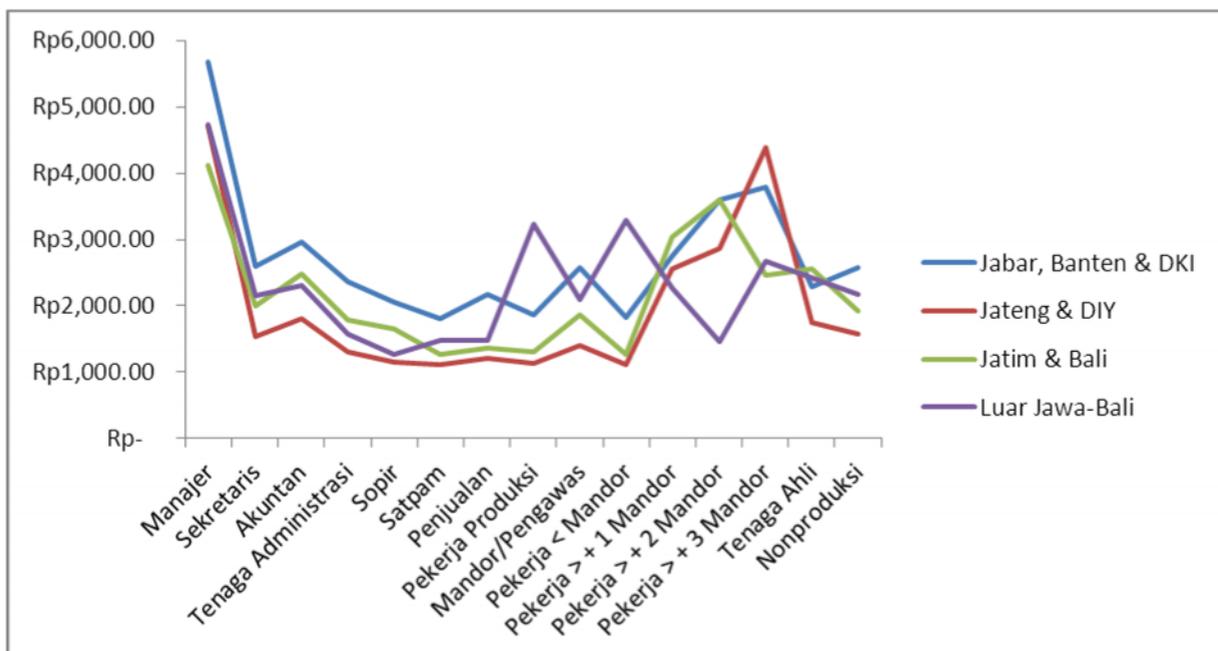
Lebih lanjut, berdasarkan data pada Table-2 dan Gambar-1 menunjukkan tingkat upah rata-rata yang terendah di Propinsi Jawa Tengah, untuk upah tenaga kerja operasional mengindikasikan perlunya kebijakan peningkatan upah yang mampu mendukung semangat dan kapasitas pekerja dalam melakukan produksi, sehingga akan makin mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing industry TPT di Jawa Tengah. Pada tabel-2 dan Gambar-1, nampak pula bahwa tingkat upah bagian tenaga produksi di Jawa Tengah juga paling rendah dibanding tingkat upah tenaga produksi industri TPT yang sama di wilayah daerah lain. Tingkat upah pekerja mandor saja yang di Jawa Tengah paling tinggi untuk upah pekerja yang lain lebih rendah dibanding upah tenaga kerja industri TPT yang sama di wilayah daerah lain.

Tabel-2: Rerata Upah Pekerja/karyawan Pada Industri Tekstildan Produk Tekstil Menurut Jabatan dan Wilayah Industri di Indonesia (dalam ribuan rupiah per bulan, 2013)

No.	Jabatan Karyawan	Jawa Barat, Banten dan Jakarta		Jawa Tengah dan DI Yogyakarta		Jawa Timur dan Bali		Luar Jawa minus Bali	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	Manajer	Rp 5,518.80	Rp 6,240.50	Rp 4,806.50	Rp 4,322.80	Rp 4,287.70	Rp 3,389.40	Rp 4,585.60	Rp 5,225.90
2	Sekretaris	Rp 2,657.10	Rp 2,575.70	Rp 1,732.80	Rp 1,529.30	Rp 2,872.90	Rp 1,732.60	na	Rp 2,149.90
3	Akuntan	Rp 3,161.80	Rp 2,862.50	Rp 2,000.60	Rp 1,744.20	Rp 2,542.60	Rp 2,469.50	Rp 3,350.80	Rp 1,883.50
4	Tenaga Administrasi	Rp 2,357.30	Rp 2,365.00	Rp 1,515.80	Rp 1,211.90	Rp 1,818.80	Rp 1,778.70	Rp 1,959.10	Rp 1,498.30
5	Sopir	Rp 2,055.00	Rp 2,522.30	Rp 1,149.90	Rp 900.00	Rp 1,686.40	Rp 569.20	Rp 1,258.80	na
6	Satpam	Rp 1,783.30	Rp 1,944.30	Rp 1,097.00	Rp 1,226.60	Rp 1,226.90	Rp 2,417.70	Rp 1,447.50	Rp 1,192.00
7	Penjualan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp

		2,328.10	2,058.30	1,260.00	1,145.50	1,842.90	1,202.40	1,385.70	1,579.90
8	Pekerja Produksi	Rp 1,929.10	Rp 1,841.50	Rp 1,115.90	Rp 1,141.30	Rp 1,551.70	Rp 1,958.30	Rp 1,718.20	Rp 3,731.30
9	Mandor/Pengawas	Rp 2,613.50	Rp 2,506.10	Rp 1,367.90	Rp 1,484.30	Rp 1,922.90	Rp 1,792.60	Rp 2,238.50	Rp 1,785.40
10	Pekerja < Mandor	Rp 1,823.70	Rp 1,823.60	Rp 1,043.60	Rp 1,129.50	Rp 1,342.60	Rp 1,222.80	Rp 1,613.80	Rp 3,760.00
11	Pekerja > + 1 Mandor	Rp 2,765.80	Rp 2,726.50	Rp 2,526.60	Rp 2,634.90	Rp 3,017.30	Rp 3,233.40	Rp 2,149.80	Rp 2,500.00
12	Pekerja > + 2 Mandor	Rp 3,317.00	Rp 3,934.00	Rp 3,085.90	Rp 2,327.40	Rp 3,736.80	Rp 1,990.00	Rp 1,465.10	na
13	Pekerja > + 3 Mandor	Rp 3,860.20	Rp 3,256.80	Rp 4,443.10	Rp 4,141.90	Rp 2,477.60	Rp 2,190.00	Rp 2,666.80	na
14	Tenaga Ahli	Rp 2,279.00	Rp 2,522.50	Rp 1,725.90	Rp 2,472.30	Rp 2,587.10	Rp 2,008.60	Rp 2,426.60	Rp 2,250.00
15	Nonproduksi	Rp 2,610.70	Rp 2,552.50	Rp 1,702.90	Rp 1,387.50	Rp 2,010.90	Rp 1,786.10	Rp 2,332.80	Rp 1,877.70
	Upah Rerata	Rp 2,737.36	Rp 2,782.14	Rp 2,038.29	Rp 1,919.96	Rp 2,328.34	Rp 1,982.75	Rp 2,185.65	Rp 2,452.83
	Upah Tertinggi	Rp 5,518.80	Rp 6,240.50	Rp 4,806.50	Rp 4,322.80	Rp 4,287.70	Rp 3,389.40	Rp 4,585.60	Rp 5,225.90
	Upah Terendah	Rp 1,783.30	Rp 1,823.60	Rp 1,043.60	Rp 900.00	Rp 1,226.90	Rp 569.20	Rp 1,258.80	Rp 1,192.00

Sumber: BPS, Statistik Struktur Upah, 2014

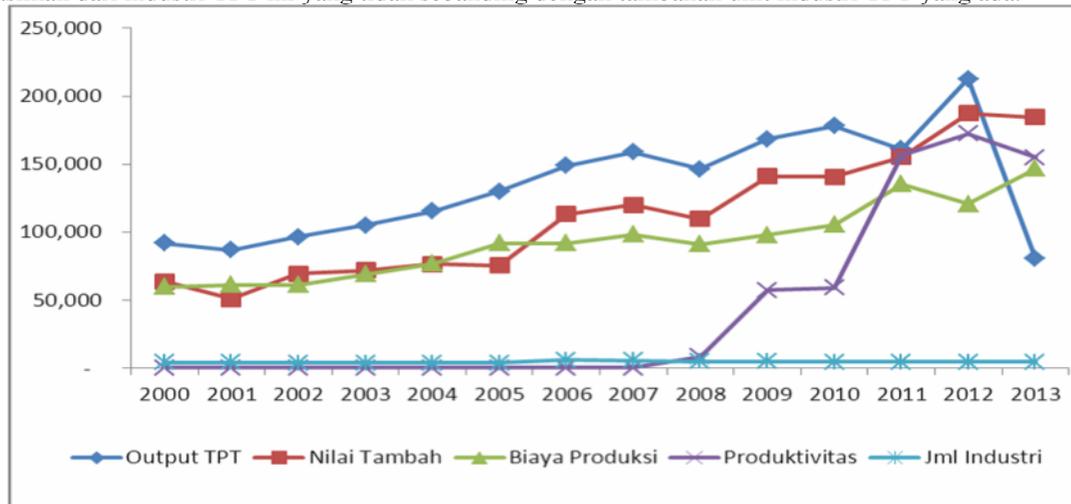


Gambar-1: Tingkat Upah Rata-rata Pekerja Tenaga Kerja pada Industri TPT di Indonesia

Pada gambar-1, untuk tingkat upah tenaga kersa seperti; manajer, sekretaris, akuntan, tenaga administrasi, sopir, satpam dan tenaga penjualan secara rata-rata tertinggi ada di daerah propinsi Jawa Barat, Banten dan Jakarta. Sedangkan, untuk tingkat upah pada tenaga yang sama tersebut di atas teramsuk upah pekerja produksi, pengawas dan mandor di Jawa Tengah justru secara rata-rata adalah yang paling rendah. Fenomena ini memperkuat jika argumentasi tuntutan kenaikan upah tenaga kerja pada pekerja industri TPT di propinsi Jawa Tengah layak dinaikan

Berdasarkan pengelompokan koridor ekonomi (KE) dalam MP3EI, Propinsi Jawa Tengah memiliki peran dalam kegiatan ekonomi utama yang sangat penting salah satunya yakni sebagai penggerak produk unggulan industri tekstil dan produk tekstil (industri TPT). Berdasarkan hasil penelitian model PAM, menunjukkan nilai PCR rata-rata sebelum ada simulasi dan sesudah ada simulasi adalah masih tinggi dan di atas nilai 0,5556 serta semakin menunjukkan ada kecenderungan industri TPT ini dapat dinyatakan menjadi daerah importir dan mengalami

deindustrialisasi. Ciri adanya kecenderungan deindustrialisasi dapat dilihat pada makin kecilnya nilai tambah yang dihasilkan dari industri TPT ini yang tidak sebanding dengan tambahan unit industri TPT yang ada.



Gambar-2: Kondisi Industri TPT di Jawa Tengah

Berdasarkan Gambar-2 dan Tabel-3, makin nampak kondisi riil industri TPT di Jawa Tengah selama periode 2000-2013, menunjukkan bahwa tingkat produktivitas industri TPT di Jawa Tengah masih tetap rendah, khususnya selama periode tahun 2000-2008, baru setelah tahun 2009-2013 ada kecenderungan yang meningkat. Nilai output dan nilai tambah memang meningkat walaupun secara kapasitas total masih rendah. Jika dibandingkan dengan jumlah industri dan jumlah tenaga kerja yang ada di setiap tahunnya selama periode penelitian tersebut.

Tabel-3: Kondisi Industri TPT di propinsi Jawa Tengah

Tahun	Nilai Output	Nilai Tambah	Biaya Produksi	Produktivitas	Jumlah Industri	Jml Tenaga Kerja
2000	91,671	63,545	59,715	144.15	4,285	1,154,933
2001	86,902	50,948	61,211	155.13	4,024	1,101,113
2002	96,296	69,533	61,153	177.01	3,920	1,060,987
2003	105,163	71,720	69,056	204.25	3,730	1,005,788
2004	115,282	76,651	76,747	223.75	3,800	998,011
2005	129,835	75,562	91,796	245.49	3,856	1,026,729
2006	148,711	113,155	91,824	258.18	6,065	1,168,474
2007	158,820	119,852	98,320	289.98	5,737	1,093,358
2008	146,482	109,500	91,242	8,363.56	5,010	993,391
2009	168,570	140,930	97,798	57,269.06	4,741	972,264
2010	178,136	140,762	105,542	59,106.54	4,553	1,016,046
2011	161,089	155,370	135,191	156,458	4,446	1,046,774
2012	212,626	187,362	120,786	172,499	4,494	1,091,446
2013	80,466	184,537	146,680	154,958	4,585	909,847
Total	1,880,049	1,559,427	1,307,061	610,352	63,246	14,639,161
Rerata	134,289.21	111,387.64	93,361.50	43,596.58	4,517.57	1,045,654.36

Sumber: BPS Jateng (diolah)

Berdasarkan hasil analisis input-output, industri TPT di Jawa Tengah pada khususnya ada kecenderungan memiliki keterkaitan lebih besar ke belakang. Hal ini menunjukkan bahwa industri TPT di Jawa Tengah sangat tergantung pada faktor produksi dan khususnya pada bahan baku dan tenaga kerja yang murah. Pada Tabel-4 dan gambar-3 nampak makin jelas bahwa keterkaitan ke belakang tersebut mengindikasikan industri TPT di Jawa Tengah ini lebih tergantung kepada faktor produksi yang ada untuk dapat berkembang lebih baik, efisien dan memiliki daya saing ke depan. Sementara itu, keterkaitan ke depan juga masih cukup besar khususnya bagi industri tekstil, hal ini mendiskripsikan bahwa peluang untuk tetap eksis bagi industri tekstil sesungguhnya lebih baik dan lebih mudah dibanding industri pakaian jadi (garmen) atau turunan dari industri tekstil yang dimaksud.

Tabel-4. Keterkaitan ke Belakang dan ke Depan Industri TPT di Jawa Tengah

Sektor	Keterkaitan (<i>Linkages</i>)
--------	---------------------------------

	Belakang (<i>backward linkage</i>)			Depan (<i>forward linkage</i>)		
	Langsung	Tidak Langsung	Total	Langsung	Tidak Langsung	Total
Industri Pemintalan	0,792175	1,846244	2,638419	1,1529701	1,002636	2,1556061
Industri Tekstil	0,70906	1,870876	2,579937	0,129059	1,022208	1,151267
Industri Tekstil Lainnya	0,644186	1,756284	2,40047	0,192802	1,092998	1,2858
Industri Pakaian Jadi	0,610801	1,85555	2,466351	0,042792	1,023857	1,066649

Sumber: Data BPS Jawa Tengah

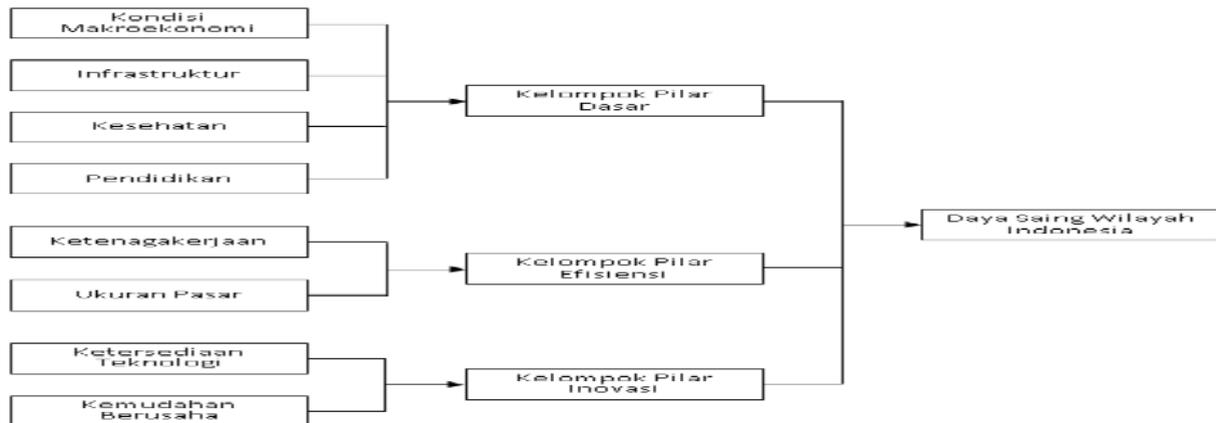
Produktivitas dan Daya Saing

Semakin tinggi tingkat produktivitas maka akan semakin tinggi tingkat daya saing industri TPT tersebut, tetapi semakin tinggi tingkat produktivitas tidak menjamin industri TPT semakin berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kualitas dapat mempengaruhi tingkat produktivitas dalam kegiatan produksi. Oleh karena itu, manajer industri TPT harus lebih mampu menemukan formulasi untuk bias menyeimbangkan antar kualitas dan produktivitas. Jika hanya terlalu menekankan pada tingkat produktivitas, maka akan dapat berdampak pada daya saing berkelanjutan seperti yang diinginkan. Karena jika hanya terlalu menekankan pada peningkatan produktivitas bias akan mengorbankan masalah kualitas, sehingga dalam jangka panjang tingkat produktivitas ini justru akan menjadi mala petaka bagi daya saing berkelanjutan. Jika produktivitas meningkat tidak dimbangi dengan kualitas yang baik, maka justru akan bisa menimbulkan penurunan tingkat produksi dalam jangka panjang yang pada akhirnya daya saing akan makin lemah. Sebaliknya, jika hanya terlalu menekankan pada tingkat kualitas saja dengan mengabaikan tingkat produktivitas, maka akan bisa menimbulkan biaya operasional semakin besar, yang pada akhirnya keuntungan dan nilai tambah serta daya saing industri juga akan menurun.

Oleh karena itu, peningkatan produktivitas pada industri TPT harus selalu diikuti secara bersamaan dengan peningkatan kualitas dan tidak boleh saling mengorbankan salah satunya. Karena dengan meningkatnya kualitas dan produktivitas secara bersamaan, akan lebih bisa menjamin keberlangsungan hidup industri dalam jangka panjang, karena industri dapat menikmati tingkat keuntungan dengan biaya produksi yang rendah (efisien). Keuntungan yang diperoleh industri adalah akan mengurangi biaya ulang (*rework cost*) dan keuntungan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) akan semakin baik serta keuntungan (profit) makin terjaga keberlangsungannya. Namun demikian, efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja (PHK) pada industri TPT sebagai industri padat tenaga kerja dengan argumetasi apapun akan tetap salah juga dan tidak boleh dilakukan.

Paket kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK jilid pertama adalah merupakan paket dasar untuk meningkatkan daya saing dan paket-paket kebijakan berikutnya adalah tindakan dan upaya untuk meraih itu. Seperti halnya paket kebijakan kenaikan upah tenaga kerja berdasarkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara umum adalah baik dan mendorong tingkat upah para pekerja sesara lebih baik. Karena pada dasarnya, yang terjadi pada industri TPT sebagai salah satu industri padat tenaga kerja dengan tingkat upah yang masih rendah harus mendapat perhatian tersebut. Jadi paket kebijakan itu tidak hanya berdasarkan liberalisasi perdagangan bebas saja sekalipun mampu meningkatkan daya saing, tetapi tetap tidak baik untuk bangsa Indonesia sendiri.

Daya saing produksi nasional Indonesia, terutama yang berbasis agro-industri dan industri padat tenaga kerja seperti industri TPT dari hulu ke hilir, harus tetap lebih dipahami, dikaji dan diteliti dengan baik secara khusus sendiri agar tidak menjadi bumerang bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dari temuan hasil riset tersebut, paling tidak akan muncul beberapa rekomendasi untuk meningkatkan daya saing berkelanjutan yang tetap bisa mampu mensejahterakan rakyat Indonesia sendiri. Berberparekomendasi tersebut paling tidak adalah sebagai berikut; (1) Pengembangan industri di Indonesia harus tetap berbasis agro industri dan industri padat tenaga kerja seperti industri TPT ini, (2) Upaya selalu meningkatkan produktivitas dan kualitas untuk mendorong dan memperkuat daya saing dalam negeri sendiri dan global secara berkelanjutan, (3) Meningkatkan kemampuan pemasaran produk lebih berdasarkan kepada daya saing yang unggul secara kualitas, produktivitas dan kreativitas serta inovasi bukan lagi berdasarkan fasilitas dan konektivitas semata, (4) Mengembangkan *Techno-Economy* (mengembangkan teknologi berbasis ekonomi atau ekonomi berbasis teknologi. Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri, (Berita Satu.com, 2016) menyatakan, perkembangan situasi ekonomi, peningkatan daya saing dan tingkat kesejahteraan pekerja di Indonesia mesti diwujudkan melalui peningkatan produktivitas di berbagai sektor. "Untuk mencapai hal tersebut, kami memiliki empat strategi, yaitu penyederhanaan sistem birokrasi dan manajemen, rekayasa dan inovasi teknologi, peningkatan kompetensi SDM dan peningkatan budaya produktif.



Sumber: Payaman J. Simanjuntak, 2015

Gambar-2: Kerangka Dasar Daya Saing Wilayah/Daerah

Berdasarkan kerangka pikir daya saing pada Gambar-2 di atas, maka tekad pembangunan daya saing industri TPT di Jawa tengah sebagai idnsutri primadona adalah merupakan wajib ain untuk selalu dikembangkan lebih lanjut, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pada beberapa tahun terakhir ini ada kecenderungan industri TPT di Indonesia dan khususnya industri TPT di Jawa Tengah telah menunjukan tingkat daya saing yang menurun dan ada kecenderungan menjadi industri importer pada produk yang sama. Oleh karena itu, berdasarkan kerangapikir pada Gambar-2 di atas, pengembangan daya saing industri tidak cukup hanya dikaji dari pilar kelompok dasar dan kelompok pilar efisiensi saja, namun harus dilakukan kajian dari pilar efisiensi yang lain yakni dari pilar inovasi. Karena daya saing industri di daerah yang baik akan mencerminkan daya saing daerah yang baik pula dan jika daya saing daerah juga baik, maka daya saing nasional Indonesia juga akan baik.

PENUTUP

Peningkatan *Techno-Economy* dan *Technoentrepreneursip*, adalah merupakan keharusan yang harus dilakukan pada semua sektor industri di Indonesia pada saat ini dan ke depan, khususnya pada lini sektor industri padat tenaga kerja seperti pada Industri TPT dan agroindustri baik dari hulu sampai hilir. Kita harus berani merubah pola pikir bahwa daya saing industri dan daya saing bangsa secara berkelanjutan harus dibangun berdasarkan kemampuan; produktivitas, kualitas, kreativitas dan inovasi teknologi, bukan lagi dibangun berdasarkan fasilitas dan konektivitas. Jika kita tetap pada pola pembangunan industri dan daya saing berdasarakan fasilitas, maka kita tidak akan lama mati dan kalah sebelum berperang di era globalisasi saat ini dan mendatang karena kehabisan amunisi fasilitas tadi. Namun demikian, riset MP3EI ini masih terbatas dan bersifat lebih makro dan belum mengkaji perilaku individu di dalam setiap industri. Karena itu, direkomendasikan untuk mengkai perilaku individu dalam meningkatkan daya saing demi kemajuan negri Indonesia ini. Terimakasih kepada DIKTI melalui DRPM yang telah menyediakan fasilitas pendanaan riset terhadap penellitian MP3EI ini selama periode 2014-2016 ini.

PUSTAKA

- Aroef Matthias. (2009). *Grand Techno-Economic Strategy*. Edisi pertama cetakan ketiga. Bandung: Mizan
- Kucukefe Bige, (2011), "Intra Industry Trade in Textile and Clothing Industry: The Case of Turkey", *International Review of Business Research Papers*, Vol. 7. No. 1. January 2011. Pp. 176–190, Mamik Kemal University:Turkey
- Lubis, Adrian, (2013), "Competitiveness, Trade Performance, and Liberalization Impact of Forestry Product", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 7 No. 1, Juli, 2013, p. 37-54.
- Pearson Scott, Carl Gotsch, and Sjaiful Bahri, (2005), "*Aplikasi Analisis Matrix Pada Pertanian Indonesia*, Jakarta: Obor Indonesia.
- Prasetyo. P. Eko. (2015). Laporan Peneltian MP3EI. (tidak dipublikasikan). Semarang: LPM UNNES.
- Prokopenko, J. (2013). *Globalization, Compettitiveness aand Productivity Strategies*. New York: Internastional Labour Organization
- Republika. (2015). Daya Saing Industri Tekstil masih Lemah. Di Upload 08 Mei 2015 dan Di akses 1 Juni 2015: <http://www.republika.co.id>
- Simanjuntak, Payaman J. (2015). Strategi Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Indonesia. *Makalah Seminar Nasional*. Disampaikan pada Segmen Integrasi ECOSOC, Jakarta: 24-25 Februari 2015

Siprianus Edi Hardum. (2016). Produktivitas dan Daya Saing Perioritas Utama Pemerintahan Jokowi-Jk. Suara Pembarua. Beritasatu.com. di upload; Selasa 19 April 2016 dan Diakses 1 Juni 2016. <http://www.beritasatu.com/ekonomi>. Jakarta: Suara Pebaharuan